



### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKD**

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKD akan memberikan gambaran tentang hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar terhadap perbaikan kondisi daerah Kabupaten Malinau dan kondisi kualitas pelayanan serta kinerja BPKD yang dituangkan dalam dokumen Renstra periode lima tahunan.

Secara khusus terhadap Pernyataan isu strategis yang tercantum didalam RPJM Kabupaten Malinau hampir seluruhnya berimbas terhadap pelaksanaan tupoksi BPKD.

BPKD dalam menyusun rencana strategis, secara maksimal berusaha untuk dapat mengatasi berbagai ancaman dan peluang yang berasal dari luar organisasi (eksternal BPKD), agar dapat secara efektif dan efisien menanggapinya sebelum muncul permasalahan-permasalahan kritis. Pemahaman faktor eksternal ini didasari oleh pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan internal BPKD. Pengantisipasi yang efektif dibangun



diatas kekuatan/potensi diri dengan meminimalkan kelemahan, untuk mendapatkan keuntungan dari peluang dan/atau mengatasi ancaman.

Langkah tersebut diperlukan untuk dapat meletakkan landasan bagi identifikasi atas isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKD, untuk kemudian dipahami apa-apa saja yang akan menjadi faktor-faktor penentu keberhasilan, dalam merealisasikan capaian sasaran dan tujuan untuk mewujudkan visi dan misi BPKD.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKD**

Permasalahan tugas dan fungsi pelayanan BPKD merupakan salah satu dari permasalahan pembangunan daerah, perlunya dilakukan identifikasi permasalahan agar menjadi acuan yang jelas untuk

memastikan visi dan misi BPKD telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BPKD kabupaten Malinau. Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan BPKD yang sebagiannya telah dapat diatasi dengan baik yang walaupun sebagiannya masih harus



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

diupayakan untuk peningkatan kekuatan BPKD kearah yang lebih baik guna mendukung Program GERDEMA adalah sebagai berikut:

1. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah mendapat opini WTP (wajar Tanpa Pengecualian). BPKD sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan memiliki target WTP, target ini dapat tercapai pada tahun anggaran 2016 yang lalu, yang walaupun tahun 2015 sebelumnya berada pada opini WTP-DPP ( Dengan Paragraf Penjelasan).
2. Alokasi dana relatif terbatas untuk dapat mengakomodir keseluruhan belanja Daerah Kabupaten Malinau;
3. Latar belakang pendidikan aparatur keuangan yang sesuai dengan kompetensi keuangan belum memadai;
4. Tingkat disparitas atas pemahaman prosedur administrasi Pengelolaan keuangan cukup tinggi;
5. Luas ruang kantor tidak memadai untuk menampung seluruh sarana dan arsip pendukung Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Malinau;



6. Tingkat penguasaan aparatur atas teknologi berbasis IT masih terbatas;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

#### **Malinau Tahun 2016 – 2021**

Renstra BPKD Kabupaten Malinau disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun (2016-2021), yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala BPKD. Dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJM Kabupaten Malinau yang diantaranya berisi Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2016–2021.

Visi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021 adalah:

***"Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera  
Melalui Gerakan Desa Membangun".***

Maksud dari pernyataan tersebut adalah: Visi tersebut juga relevan dengan Visi sebelumnya, yang mengambil Semboyan Berubah Maju dan Sejahtera. "Berubah untuk Maju dan Maju untuk menggapai



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

Kesejahteraan". "Berubah" untuk mengejar ketertinggalan, "Maju" mengatasi kemiskinan, dan "Sejahtera" dengan meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara sederhana, sejahtera mudah dipahami sebagai perasaan: aman sentosa, makmur, dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari " rasa lapar" dan " rasa takut". Sedangkan kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batin. Kesejahteraan yang dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi Daerah Kabupaten Malinau juga dimaknai oleh terselenggaranya kehidupan demokrasi ditingkat local sebagai salah satu pilar penyangga pencapaian kesejahteraan masyarakat secara lebih fundamental.

Sehingga dari pernyataan Visi tersebut, BPKD dalam setiap gerak langkah selama lima tahun kedepan yang dituangkan dalam rumusan visi harus dapat selaras dan sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih Tahun 2016 – 2021 yang menitik beratkan pada lima pilar pembangunan yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
2. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia



3. Pengembangan Ekonomi Desa dan Daerah Kabupaten Malinau
4. Pengembangan Ibukota Malinau menjadi Kota Mandiri
5. Penatalayanan Pemerintahan atau Reformasi

Perwujudan Visi Kabupaten Malinau yang ditempuh melalui Misi merupakan komitmen melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian Visi.

Misi Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2016-2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik.
2. Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Daerah Kabupaten Malinau, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur Daerah Kabupaten Malinau baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
4. Meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten Malinau dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa,



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan.

5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian Daerah Kabupaten Malinau, melalui pengembangan produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan "Bertani Sehat";
6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa
7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: "Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata Daerah Kabupaten Malinau, dengan memperbanyak atraksi seni Daerah Kabupaten Malinau, pelestarian seni dan budaya Daerah Kabupaten Malinau
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Terhadap Misi yang diemban oleh Kepala Daerah Kabupaten Malinau periode 2016-2021, BPKD melaksanakan Misi yang ke 2, 9 dan 12 yaitu menjadi pelaksana dan penunjang dari segi Pengelolaan keuangan daerah dimana BPKD akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi Pengelolaan



keuangan yang bersih, efisien, efektif dan kredibel guna mendukung Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA).

Upaya perwujudan Visi BPKD untuk mendukung perwujudan Visi Kabupaten Malinau tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. BPKD telah dapat menginventarisir tantangan dan hambatan yang akan dihadapi sebagai berikut:

1. Tingginya tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah
2. Cepatnya arus perubahan peraturan perundangan tentang Pengelolaan keuangan daerah
3. Tidak stabilnya sumber tegangan listrik dan gangguan hewan pengerat atas jaringan di lingkungan kantor dapat menghambat kinerja keuangan daerah
4. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh unsur pimpinan daerah dalam menyusun APBD dan pertanggungjawabannya
5. Tingginya disparitas pemahaman Pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki oleh bendahara SKPD



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pengelola Keuangan daerah Propinsi Kalimantan Utara, Renstra BPKD Sebelumnya.**

Adapun Visi, Misi, dan Tujuan dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **Visi Kementerian Keuangan**

Visi Kementerian Keuangan adalah: "Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan".

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah Pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.



### Misi Kementerian Keuangan

- a. Misi Fiskal adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan bertanggungjawab
- b. Misi Kekayaan Negara adalah mewujudkan Pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan sasarannya, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggungjawab
- c. Misi pasar modal dan lembaga keuangan adalah mewujudkan industry pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.
- d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah :
  1. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat.
  2. Membangun dan mengembangkan sdm yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggungjawab.
  3. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya



Visi Provinsi Kalimantan utara :

***“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kalimantan Utara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai dengan dukungan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”.***

Pernyataan visi Provinsi Kalimantan Utara tersebut mengandung makna bahwa, penerapan otonomi Daerah Kabupaten Malinau seutuhnya akan membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kepada manajemen keuangan yang sehat. Pengelolaan keuangan dan kekayaan Daerah Provinsi Kalimantan utara diharapkan dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang sudah menjadi tuntutan masyarakat.



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Malinau meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pertanggung jawaban, serta akuntansi dan pelaporan. Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Malinau juga diarahkan pada pemberian peranan yang besar kepada pejabat pelaksana anggaran, penciptaan sistem pengawasan pengeluaran dan pembayaran yang baik, manajemen kas dan perencanaan keuangan yang matang, Pengelolaan piutang dan utang, Pengelolaan investasi, dan BUMD. Pelayanan yang prima juga mengandung maksud bahwa jasa yang dihasilkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan tersebut.

### **Misi Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kalimantan utara**

- a. Menciptakan sistem Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Malinau yang transparan, akuntabel dan uptodate
- b. Membina Profesionalisme BUMD, dan Pengelolaan Keuangan Kota se-provinsi Kalimantan utara



- c. Menciptakan sistem manajemen aset yang transparan, akuntabel dan uptodate
- d. Meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Sehingga dapat ditarik benang merah hal-lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah prioritas pembangunan nasional. Review ini penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra BPKD Kabupaten Malinau dengan Renstra Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kalimantan utara.

Sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baruyaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Visi dan Misi Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memberikan implikasi pendukung dan penghambat terhadap perwujudan Visi BPKD melalui pelaksanaan Misi.

a. Faktor Pendukung

1. Sebagai organisasi yang relative baru Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki komitmen dan semangat yang besar untuk melakukan pembinaan dan koordinasi kepada SKPD pengelola keuangan se-Kalimantan Utara
2. Potensi yang besar terhadap PAD Provinsi Kalimantan Utara
3. Mendapatkan opini WTP untuk tahun anggaran 2015

b. Faktor Penghambat

1. Potensi PAD Provinsi Kalimantan Utara yang belum tergali secara optimal sehingga mengurangi dana bagi hasil
2. Sebagai organisasi yang relative baru Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki keterbatasan sumber daya manusia



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Analisis**

#### **Lingkungan Hidup Strategis**

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang efektif akan menghasilkan informasi yang sangat penting bagi keberhasilan dalam pengambilan keputusan dengan demikian diperoleh pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi.

Dengan kata lain personil BPKD harus dapat mengantisipasi sesegera mungkin untuk menghindar dari setiap ancaman yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi. Selain itu personil BPKD harus dapat menangkap setiap peluang yang ada agar menjadi sesuatu yang berguna untuk kemajuan dan perbaikan bagi guba mewujudkan visin yang telah ditetapkan. Analisis terhadap lingkungan organisasi strategis sangat berpengaruh terhadap kinerja BPKD, hasil penilaian dapat memberikan informasi yang sangat penting bagi kelangsungan dan kesuksesan organisasi.

Rencana tata ruang dan kajian analisis lingkungan hidup strategis memberikan dampak pendukung dan penghambat terhadap perwujudan Visi BPKD, yaitu:



a. Faktor Pendukung

1. Kabupaten Malinau memiliki potensi lingkungan hidup yang dimiliki untuk dapat dikelola secara bijak dan arif
2. Wilayah Kabupaten Malinau sebagai daerah pedalaman dan perbatasan merupakan prioritas pengembangan dan pembangunan bagi program “Nawacita”
3. Sebagai daerah otonom yang relative baru, kabupaten Malinau masih memiliki keleluasaan dalam melakukan perencanaan dan penataan wilayah

b. Faktor Penghambat

1. Kabupaten Malinau sebagai daerah konservasi yang didominasi kawasan hutan yang terbatas dalam pengelolaannya
2. Sektor pertambangan sebagai salah satu sektor yang dominan bagi Kabupaten malinau memiliki resiko terhadap dampak lingkungan hidup

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di subbab diatas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Disamping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari beberapa permasalahan tersebut bisa ditarik **Isu Strategis** yang ada di BPKD adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Penganggaran perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan waktu, ketepatan alokasi dan ketepatan dana;
2. Kinerja Pengelolaan Aset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian;
3. Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Malinau I dan Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Malinau II perlu ditingkatkan terutama dari



## *Rencana Strategis 2016 – 2021*

upaya Peningkatan kontribusi yang optimal bagi penyediaan pembiayaan Daerah Kabupaten Malinau.

Dari hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan terkait dan analisis lingkungan sekitar, maka terdapat isu strategis pada BPKD yang harus menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan maka terdapat beberapa isu strategis BPKD Kabupaten Malinau yang tentu saja terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Terciptanya ketertiban keuangan daerah yang akuntabel dengan kuatnya hubungan kerja kemitraan yang harmonis antara BPKD dengan SKPD lain, antara panggar eksekutif dan banggar legislatif, koordinasi vertical dengan Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta komunikasi dialogis dengan masyarakat dan organisasi sosial.